

VERIFIKASI DUKUNGAN PERSEORANGAN Polres Gunungkidul Kerahkan 360 Personel

WONOSARI (KR) - Mendukung kelancaran tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada), diterjunkan personel untuk mengawal jalannya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Sebanyak 360 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan tahapan pilkada.



KR-Dedy EW
AKBP Agus Setiawan.

"Personel sudah siap untuk melakukan pengamanan tahapan verifikasi faktual di lapangan. Juga telah digelar apel kesiapan personel untuk melakukan pengamanan tahapan pilkada di Gunungkidul," kata Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setiawan SIK usai Apel Kesiapan Pengamanan Pilkada di halaman Mapolres Gunungkidul, Rabu (23/6).

Diungkapkan, personel dalam melakukan pengamanan tahapan pilkada juga tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kepolisian juga terus mensosialisasikan untuk seluruh masyarakat dalam menggunakan masker, mencuci tangan hingga menjaga jarak untuk mencegah Covid-19. Pada prinsipnya pengamanan untuk tahapan pilkada sesuai dengan standar protokol kesehatan sudah siap. "Seluruh personel yang bertugas tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Termasuk dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini menjaga jarak, memakai masker dan menjaga kebersihan serta

mencuci tangan," ucapnya.

Kapolres mengimbau, untuk para bakal calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati Gunungkidul agar ikut mendukung terciptanya suasana yang aman dan kondusif. Sehingga tahapan pilkada Gunungkidul dapat berjalan dengan lancar. "Tentunya semua pihak harus ikut menjaga situasi atau jalannya pilkada Gunungkidul berjalan dengan lancar. Termasuk dari bakal calon perseorangan pilkada Gunungkidul," ujarnya. Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani menambahkan, pelaksanaan verifikasi faktual akan dimulai 27 Juni sampai 10 Juli 2020. Prosesnya tetap sesuai protokol kesehatan. Jumlah yang akan diverifikasi mencapai kurang lebih 90 ribu dukungan dari 2 bakal calon perseorangan. **(Ded/Bmp)-f**

PILKADA 9 DESEMBER 2020

Berpotensi Tambah Jumlah Pemilih

WONOSARI (KR) - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunungkidul yang akhirnya diundur akibat pandemi Corona dan terjadwal pada Rabu 9 Desember 2020 mendatang berpotensi jumlah pemilih meningkat. Jadwal semula akan digelar pada bulan September 2020, dengan mundurnya tiga bulan pelaksanaan diperkirakan menambah jumlah pemilih pemula berumur 21 tahun. "Dari petugas nantinya akan melakukan pencermatan kembali mengenai data-data baru untuk pemilih tambahan karena faktor usia memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan tersebut," kata Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani Senin (22/6).

Saat ini persiapan dan tahapan yang sempat tertunda akibat pandemi telah kembali dilanjutkan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul maupun dari Bawaslu Gunungkidul. Dengan mundurnya pelaksanaan Pilkada beberapa waktu ini pihaknya telah menerima daftar tambahan pemilih dari Kemendagri. Daftar tersebut diambil dari salinan data penduduk yang berpotensi menjadi pemilih. Mereka itu adalah penambahan pemilih usia 17 tahun sampai dengan tanggal 9 Desember 2020. Data semula jumlah pemilih potensial Pilkada 2020 mencapai 612.295 jiwa, dengan mundurnya pelaksanaan

Pilkada jumlah pemilih akan bertambah. "Semua sedang berproses dan nantinya diharapkan ada akurasi untuk tambahan data baru," ujarnya.

Sementara untuk tahapan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gunungkidul yang sempat terhenti akibat dampak pandemi Corona akan dilanjutkan kembali. Hal tersebut mengacu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi memutuskan bahwa jadwal pelaksanaan pilkada akan diselenggarakan pada Rabu, 9 Desember 2020 mendatang. Proses pasangan calon perseorangan untuk verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan akan dilaksanakan lagi selama 14 hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS.

Verifikasi pasangan perseorangan dilaksanakan Rabu (24/6 sampai Minggu 12/7) dan pengumuman pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada Jumat 28 Agustus hingga Kamis 3 September 2020 dilanjutkan pendaftaran pasangan calon Jumat 4 September sampai dengan Minggu 6 September 2020, revisi persyaratan calon hingga pemeriksaan kesehatan. Penetapan dan pengundian nomor pasangan calon pada Rabu 23 September 2020. Masa kampanye akan dilaksanakan mulai Sabtu 26 September hingga Sabtu tanggal 5 Desember 2020. **(Bmp)-f**

PERSYARATAN SKTM PPDB SMP/MTS

Dinsos Hanya Layani Rekomendasi Kolektif

WATES (KR) - Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kulonprogo hanya melayani dari sekolah yang mengajukan permohonan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran PPDB SMP/MTs 2020/2021.

Kepala Dinsos P3A Kulonprogo Y Iriyanto, Minggu (21/6) mengungkapkan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencarian rekomendasi SKTM bagi lulusan SD dari keluarga tidak mampu untuk keperluan pendaftaran PPDB SMP/MTs.

Menurutnya, para orangtua yang anaknya membutuhkan SKTM tidak perlu mengurus sendiri. Dinsos P3A Kulonprogo sudah mengkoordinasikan dengan Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) Kabupaten, dilakukan secara kolektif oleh sekolah masing-masing.

"Para orangtua tidak perlu datang ke Dinsos P3A. Pihak sekolah diharapkan bersedia mengusulkan secara kolektif

daftar nama anak yang membutuhkan SKTM untuk keperluan PPDB," ujar Iriyanto.

Persyaratan SKTM untuk PPDB 2020/2021 masuk sekolah SMP/MTs menggunakan sistem daring atau online berbeda dengan kelengkapan persyaratan SKTM masuk SMA/MA dan SMK. Di masa pandemi Covid-19 sudah dapat mengunduh di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dari Kementerian Sosial.

SOP rekomendasi SKTM untuk kelengkapan persyaratan PPDB SMP/MTs, katanya pihak sekolah mengusulkan daftar siswa pencari SKTM dari sekolahnya. Selanjutnya Dinsos P3A melakukan verifikasi dengan DTKS dari Kementerian Sosial.

Dinsos P3A akan mengeluarkan satu rekomendasi SKTM dari hasil verifikasi daftar nama yang diusulkan sekolah. Rekomendasi tersebut dikirimkan ke Disdikpora untuk didistribusikan ke sekolah. **(Ras)-f**

SD MUH UNGGULAN AL FATIH PATUK

Siapkan Pembelajaran Daring

WONOSARI (KR) - Mendukung pencegahan Covid-19, SD Muhammadiyah Unggulan Al Fatih Patuk siap untuk melaksanakan pembelajaran dengan sistem *daring*. Bahkan untuk kuota penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 sudah terpenuhi sebanyak 56 anak. "Sekolah sudah siap jika memang nantinya melaksanakan pembelajaran *daring*. Untuk penerimaan siswa baru sudah terpenuhi, sebanyak 2 rombongan belajar 56 anak. Bila ada yang masih minat untuk ditahun berikutnya, bisa mendaftar dari sekarang," kata Ketua Pendi SD Muh Unggulan Al Fatih

Patuk Drs Basuki Rohmad di dampingi Sekretaris Judik SAg, Selasa (23/6).

Untuk pembelajaran, lanjutnya nanti masih menempati di gedung Kampus 2 SMK Muhammadiyah 1 patuk. Karena masih menunggu proses pembangunan gedung SD Muh Unggulan Al Fatih di Jalan Raya Wonosari Km 24,5. Sekolah bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta dalam pengembangan bidang *Active Learning*. Termasuk bekerja sama dengan SD Muhammadiyah Condongcatur Depok Sleman dan lainnya. **(Ded)-f**

Data Ganda, Pemkab Tolak Bansos Difabel

WATES (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat memilih untuk tidak menerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Sedianya bantuan sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan tersebut akan diberikan bagi 156 penyandang disabilitas.

Kepala Dinsos Kulonprogo Y Iriyanto mengatakan hal tersebut ketika menerima kunjungan dari Komisi D DPRD DIY dalam rangka sinkronisasi bansos, Selasa (23/6). Menurutnya, ke-156 penyandang disabilitas calon penerima tersebut tertuang dalam SK Gubernur.

Syarat bisa menerima bantuan tersebut tidak termasuk dalam penerima

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial, bantuan sembako dan bansos perluasan. Ke-156 nama yang tertuang dalam SK tersebut semuanya sudah menerima bantuan.

"Jadi kita putuskan untuk tidak menandatangani berita acara. Pasalnya, semua nama penyandang

disabilitas tersebut telah menerima bantuan sosial dari program lain. Padahal syarat bisa menerima, tidak termasuk penerima bantuan lain," jelasnya.

Guna menghindari permasalahan di kemudian hari, Pemkab Kulonprogo memutuskan untuk tidak menandatangani berita acara tersebut. Maka secara otomatis nama-nama penyandang disabilitas itu juga tidak akan mendapatkan bansos khusus yang dana-dia dianggarkan dari APBD DIY tersebut. "Sebelumnya dari Inspektorat juga sudah mempertanyakan perihal berita acara tersebut. Kalau berdasar-

kan isian berita acara termasuk tidak layak, karena data ganda. Kalau harus kita tarik lagi, kan kasihan," ujarnya.

Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari Komisi D DPRD DIY. Sebab, jika Pemkab Kulonprogo tetap menandatangani berita acara, bisa jadi temuan.

Karena sudah mendapatkan bantuan sebelumnya. "Ini menjadi perhatian bagi Pemda DIY. Semestinya ada sinkronisasi data. Baik dari pusat hingga daerah. Tujuannya, agar segala jenis bantuan bisa benar-benar tepat sasaran," ujar Ketua Komisi D DPRD DIY Koeswanto. **(Awh/Bro)-f**

Kapolda DIY Tanam dan Panen Cabai

WATES (KR) - Kapolda DIY, Irjen Pol Asep Suhendar melakukan penanaman bibit cabai dan panen cabai serta membagikan sembako kepada masyarakat di Pos Polisi Air Udara (Polairud) Congot Temon, Selasa (23/6). Kegiatan ini menandai Hari Bhayangkara ke-74 diadakan Direktorat Polairud Polda DIY.

Kapolda DIY melalui Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto menyampaikan, Ditpolairud Polda DIY melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-74, yakni penyerahan sebanyak 45 paket sembako kepada

masyarakat, petugas Radar Congot, Lanal dan Babinsa.

Selain menyerahkan bantuan paket sembako, Kapolda DIY juga melakukan penanaman bibit cabai sebanyak 3.000 pohon sekaligus melakukan panen cabai dari 2.880 pohon yang telah ditanam tiga bulan sebelumnya di lahan sekitar Pos Polairud Congot.

"Untuk ketahanan pangan kita ikut mendukung program pemerintah untuk memberdayakan lahan di sekitar Pos Polairud Congot. Lahan tersebut kita manfaatkan bersama masyarakat untuk menanam cabai dan hasil-



KR-Dani Ardiyanto

Irjen Pol Asep Suhendar (kedua kanan) memanen cabai di lahan sekitar Pos Polairud Congot Temon.

nya dinikmati oleh masyarakat sekitar," kata Kombes Pol Yulianto.

Sementara Direktur Polairud Polda DIY, AKBP Rudi Rifani mengatakan, pengelolaan lahan, pihaknya bekerja sama dengan masyarakat. "Lahan kita terbatas

sehingga ada satu kelompok masyarakat sebagai mitra. Mereka yang mengolah lahan, melaksanakan pemeliharaan dan melakukan panen. Hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat," jelasnya. **(M-4)-f**

NJOP UNTUK BPHTB MEMBERATKAN

Komisi II Panggil Lagi BKAD



KR-Widiastuti

Komisi II panggil BKAD terkait NJOP untuk BPHTB yang memberatkan.

PENGASIH (KR) - Komisi II DPRD Kabupaten Kulonprogo memanggil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Bea Perolehan Hasil atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelaksanaan kebijakan Kenaikan NJOP di Kulonprogo sangat mem-

beratkan bagi masyarakat yang mengurus bea balik atas waris dan wasiat hibah. Keberatan dirasakan dalam pembayaran pajak BPHTB yang hitungannya berdasarkan NJOP.

Menurut Ketua Komisi II H Priyo Santoso SH MHum, rapat kerja digelar dalam rangka menagih janji pada saat raker se-

belumnya di mana Komisi II meminta kepada Pemkab untuk membuat kebijakan rumusan baru dalam perbup tanpa harus melanggar aturan di atasnya. "Maka kami *ngaruhke* lagi terhadap progres kebijakan yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Kulonprogo," ujar Priyo saat raker di ruang Nakula yang dihadiri unsur pimpinan, Komisi II, dan unsur BKAD, Senin (23/6).

Selama ini, pemberlakuan pajak BPHTB atas kenaikan NJOP dirasa sangat memberatkan bagi masyarakat khususnya yang menerima karena waris atau hibah.

Sampai saat ini, disampaikan Kepala BKAD Kulonprogo Eko Wisnu Wardana SE, jumlah war-

ga yang mengajukan keberatan BPHTB waris sebanyak 50 permohonan, dan hibah wasiat sebanyak 40 pemohon.

Eko Wisnu menambahkan, Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019. "Dari aturan itu banyak dikeluhkan warga terutama yang mengatur hibah waris dan hibah wasiat karena menyebabkan BPHTB tinggi. Kami tidak mengubah seluruh pasal peraturan daerah, tapi hanya tiga pasal tentang hibah wasiat dan hibah waris," tandasnya. **(Wid)-f**

UNTUK WARGA TERDAMPAK COVID-19

Pemkab Cairkan Rp 10, 4 Miliar

PANGGANG (KR) - Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul menyerahkan bantuan untuk warga terdampak Corona meliputi rumah tangga, pekerja informal dan usaha mikro juga warga miskin terdacer berdasarkan non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul, Hadi Hendro Prayogi mengatakan, untuk pemberian bantuan yang bersumber dari APBD Gunungkidul senilai Rp 10,4 miliar tersebut diberikan pada 4.824 warga. "Bantuan sudah mulai kami salurkan bekerjasama dengan Bank Daerah Gunungkidul (BDG) secara tunai," katanya, Selasa (23/6).

Besaran bantuan tunai tersebut untuk sebanyak 4.824 rumah tangga penerima manfaat yang masuk dalam kategori positif Corona, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan masing-masing mendapat Rp 300 ribu diterima satu kali. Selain itu ju-

ga kepada sebanyak 2.960 rumah tangga yang masuk dalam kategori warga miskin terdacer non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masing-masing akan mendapatkan Rp 600 ribu dengan skema 2 kali penyerahan masing-masing Rp 300.000. Kemudian sebanyak 11.536 rumah tangga atau individu yang masuk dalam kategori pekerja informal, usaha mikro terdampak, buruh dan kelompok sosial yang terdampak akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu diterimakan bulan Juni ini. "Kami juga menyalurkan bantuan sembako sebanyak 900 paket untuk keluarga yang isolasi mandiri dan OTG sebesar Rp 300 ribu," ujarnya.

Untuk penyerahan bantuan tersebut sudah berjalan dua hari dan targetnya selesai akhir pekan ini. Penyerahan bantuan tersebut tetap mengacu protokol kesehatan secara penuh dan tidak terjadi kerumunan. Dalam penyerahan tersebut petugas bank melakukan pet-



KR-Bambang Purwanto

Penyaluran bantuan terdampak Corona di Desa Gurisekar, Panggang.

nyanan terhadap warga penerima manfaat dan berjalan tertib. Sebenarnya sesuai rencana akan diserahkan akhir pekan lalu. Tetapi karena terkendala teknis dan perlu pengaturan maka baru bisa dilakukan pencairannya mulai. Senin (22/6). "Pencairan melalui BDG berjalan lancar sesuai protokol kesrhatan," ucap Henry petugas dari BDG Gunungkidul.

Sekretaris Dinas Sosial, Wijang Eka Aswana membenarkan pencairan bantuan tersebut mulai dilakukan Senin (22/6) pagi, Pemkab Gunungkidul mulai menyalurkan bantuan

bagi mereka yang masuk dalam daftar penerima.

Penerimaan bantuan ini bisa diwakilkan jika yang bersangkutan berhalangan hadir. Misalnya melalui pemerintah desa ataupun anggota keluarga yang satu KK.

Penyaluran bantuan tersebut juga dalam pengawasan melalui instansi terkait. Bahkan dari KPK dan BPKP juga turut mengawasi penyaluran bantuan dari APBD Gunungkidul ini. "Kita berharap bantuan ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini," terangnya. **(Bmp)-f**